



Media: Harian Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 18 Januari 2025

Halaman: 3

► BANTUAN SOSIAL

501 Penerima PKH Akhiri Kepesertaan

UMBULHARJO— Sepanjang 2024, sebanyak 501 keluarga penerima manfaat (KPM) peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Jogja lulus atau mengakhiri kepesertaan. Hal ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan ratusan keluarga tersebut.

Lugas Subarkah
lugas@harianjogja.com

► Graduasi mandiri dilakukan dengan mendorong peserta PKH mengakhiri kepesertaan karena kondisi ekonomi yang membaik

► Ketika ada KPM yang berpotensi mandiri, maka diusulkan agar mendapat program pemberdayaan.

Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja, Supriyanto, menjelaskan kelulusan berarti berakhirnya kepesertaan KPM dalam PKH. Hal ini bisa terjadi secara alami maupun mandiri.

"Graduasi alami terjadi ketika KPM tidak lagi memenuhi kriteria

dari tujuh indikator penilaian, seperti adanya ibu hamil, anak balita, anak sekolah jenjang SD sampai SMA, warga lansia, atau anggota keluarga yang memiliki disabilitas" ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (17/1).

Sedangkan graduasi mandiri, menurut Supriyanto, dilakukan dengan mendorong keluarga peserta PKH mengakhiri kepesertaan

dengan kesadaran sendiri, karena kondisi sosial ekonomi mulai membaik sehingga tidak lagi menggantungkan bantuan dari pemerintah.

"Pada 2023, total peserta PKH ada 12.489 KPM, dan 2024 turun menjadi 11.988 KPM. Artinya, ada 501 KPM yang lulus atau istilahnya graduasi, ada yang alami dan ada mandiri. Dari persentasenya cukup berimbang, 50 persen alami, dan 50 persen mandiri," katanya.

Saat ini, Dinsosnakertrans terus mendorong graduasi KPM secara mandiri, salah satunya

melalui peran pendamping PKH yang secara intens di lapangan mengamati peserta mana saja yang berpotensi mandiri, dilihat dari sisi pekerjaan atau usaha yang dijalankan hingga penghasilan atau omset yang dihasilkan.

"Intervensi program dalam hal ini adalah program pemberdayaan, ketika ada KPM yang berpotensi akan kami usulkan agar mendapat dukungan lebih lanjut. Misalnya melalui program pemberdayaan dari Pemkot maupun dari Kementerian Sosial," ujarnya.

Salah satu pendamping PKH dari Kemantren Gedongtengen,

Yunan Adiarto, mengatakan dirinya sudah mendampingi KPM sejak 2016.

Perannya terlibat dalam proses bisnis PKH, meliputi verifikasi dan validasi data, penyaluran bantuan sosial, pemutakhiran data, sosialisasi dan pendampingan hingga graduasi. "Kami terus memberikan pemahaman dan motivasi kepada KPM kalau bantuan itu sifatnya tidak selamanya, supaya tidak bergantung, sehingga mereka punya semangat untuk semakin berdaya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kondisi ekonomi keluarga," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005